

Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang

Dewi Nita Rahmawati¹, Hadi Sucipto²

^{1,2}ITEBIS PGRI Dewantara Jombang

2262057@itebisdewantara.ac.id, hadisucipto@itebisdewantara.ac.id

ABSTRACT.

This research seeks to examine how the application of Good Governance principles and adherence to Government Accounting Standards influence the quality of financial reports within the Jombang Regency Government. A quantitative research design was adopted, utilizing a survey method through the distribution of questionnaires to officials responsible for financial management in Regional Apparatus Organizations. The study involved 56 purposively selected respondents. Data were processed through descriptive statistics, validity and reliability assessments, classical assumption testing, and multiple linear regression analysis using SPSS software. Findings reveal that both Good Governance practices and Government Accounting Standards individually exert a positive and significant impact on the quality of local government financial statements. Among these, Government Accounting Standards emerge as the most influential factor affecting financial report quality. The study concludes that enhancing the quality of local government financial reporting necessitates a collaborative effort between robust governance implementation and consistent adherence to accounting standards, reinforcing the principle of public financial accountability.

Keywords: *Good Governance; Government Accounting Standards; Financial Report Quality; Local Government*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pejabat pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebanyak 56 responden dipilih secara purposive sebagai sampel penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penerapan tata kelola pemerintahan yang baik maupun Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di antara kedua variabel tersebut, Standar Akuntansi Pemerintah terbukti menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan sinergi antara penerapan tata kelola yang baik dan kepatuhan yang konsisten terhadap Standar Akuntansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Kata kunci: *Good Governance; Standar Akuntansi Pemerintah; Kualitas Laporan Keuangan; Pemerintah Daerah*

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam lembaga publik memiliki peran yang krusial karena berhubungan langsung dengan pengelolaan kebijakan publik, pertanggungjawaban keuangan, serta tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Konsep *Good Governance* bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berfokus pada peningkatan mutu pelayanan publik. Dengan demikian, setiap proses dan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan prinsip *Good Governance* menjadi landasan penting bagi terciptanya laporan keuangan yang andal, informatif, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan (Sartika et al., 2024).

Pemerintahan yang dijalankan secara efektif dan akuntabel merupakan faktor mendasar dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Seiring berkembangnya kesadaran publik terhadap hak-hak sipil dan pelayanan yang seharusnya mereka peroleh, muncul dorongan yang semakin kuat untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada pelayanan publik dalam praktik pemerintahan. Menurut *World Bank*, *Good Governance* diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta supremasi hukum (Angye Mareta et al., 2025). Konsep tersebut tidak hanya dipahami sebagai idealisme normatif, melainkan juga sebagai panduan operasional yang bertujuan memastikan setiap proses pemerintahan dijalankan dengan tanggung jawab dan keterbukaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Sartika et al., 2024).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki signifikansi yang tinggi karena berhubungan langsung dengan pengelolaan dana publik yang bersumber dari pajak serta retribusi masyarakat. Ketidaktransparanan dan lemahnya akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan anggaran, pemborosan sumber daya, hingga munculnya tindak korupsi. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada prinsip *Good Governance* menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan publik yang efektif dan terpercaya. Meski demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi tantangan, baik dari sisi struktur kelembagaan maupun budaya birokrasi. Hambatan tersebut mencakup lemahnya penegakan hukum, rendahnya transparansi dalam birokrasi, integritas aparatur yang belum optimal, serta adanya resistensi terhadap inovasi, reformasi sistem, dan pemanfaatan teknologi baru (Abdurrohman et al., 2025). Dari sudut pandang akademik, isu penting yang muncul adalah bagaimana menilai serta membuktikan secara empiris sejauh mana penerapan *Good Governance* dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil kajian literatur terbaru menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejumlah penelitian terdahulu memberikan temuan yang beragam; sebagian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut (Advia et al., 2023; Hirzun et al., 2024; Utami dan Berliani, 2024). Sedangkan penelitian lainnya mengungkapkan bahwa faktor tambahan, seperti kompetensi aparatur, dapat memperkuat atau memoderasi hubungan tersebut (Zein et al., 2024; Siti Munawaroh et al., 2025). Perbedaan Variasi hasil penelitian ini mengindikasikan adanya celah konseptual maupun empiris yang membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji pengaruh *Good Governance* dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara langsung, tanpa melibatkan variabel perantara lainnya.

Secara konseptual, penelitian ini didasarkan pada teori agensi dan teori akuntabilitas sebagai pijakan utama. Teori agensi memandang adanya hubungan kontraktual antara prinsipal, yaitu masyarakat, dengan agen, yakni pemerintah, dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Hubungan tersebut menuntut adanya sistem pengawasan dan mekanisme kontrol yang efektif guna meminimalkan potensi asimetri informasi antara kedua pihak (Enre, 2023; Herawati & Nopianti, 2017). Sementara itu, teori akuntabilitas menekankan tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan laporan keuangan yang transparan, akurat, serta dapat dipahami oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dikelola (Sartika et al., 2024). Kedua teori ini menjadi kerangka analisis yang mendasari pemahaman mengenai bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan analisis terhadap pengaruh penerapan prinsip *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara langsung, tanpa melibatkan variabel moderasi atau mediasi tambahan. Fokus penelitian diarahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yang memiliki karakteristik tersendiri dalam hal tata kelola dan kebijakan pengelolaan keuangan dibandingkan dengan wilayah lain yang telah diteliti sebelumnya. Kabupaten Jombang diketahui berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI secara beruntun selama dua belas tahun (BPK RI, 2025). Meskipun demikian, capaian tersebut belum secara empiris menjelaskan sejauh mana implementasi *Good Governance* dan tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di level perangkat daerah.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua hal utama: (1) sejauh mana penerapan *Good Governance* memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan (2) bagaimana kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berperan

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan dalam literatur sebelumnya, memperkuat temuan empiris yang ada, serta memberikan masukan strategis bagi penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan publik di tingkat pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Fokus penelitian diarahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran langsung dalam proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Populasi penelitian meliputi beberapa OPD di Kabupaten Jombang yang berjumlah 42 OPD. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang mempertimbangkan kesesuaian peran OPD terhadap pengelolaan keuangan, ketersediaan data, partisipasi responden, serta efisiensi waktu dan biaya penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan delapan OPD yang terdiri atas dinas dan badan sebagai sampel penelitian. Dari masing-masing OPD diambil tujuh responden, sehingga total keseluruhan responden berjumlah 56 orang. Responden yang dipilih telah bekerja minimal satu tahun dan memiliki pemahaman yang memadai mengenai penyusunan serta pelaporan keuangan daerah. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian berbentuk pernyataan tertutup yang dirancang untuk mengukur tiga variabel utama, yakni *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan kualitas laporan keuangan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan lima tingkat penilaian. Sebelum dilakukan analisis, instrumen diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan uji reliabilitas guna memastikan keakuratan dan konsistensi data.

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS, mencakup analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t dan koefisien determinasi (R^2) dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Berdasarkan rancangan tersebut, kerangka konseptual penelitian disusun untuk menggambarkan hubungan kausal antara variabel yang diteliti. Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditempatkan sebagai variabel independen, sementara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai variabel dependen. Penerapan *Good Governance* mencerminkan praktik tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, sedangkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berfungsi menjamin keseragaman dalam proses pencatatan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Hubungan antarvariabel tersebut kemudian dirumuskan dalam dua hipotesis penelitian, yaitu: (H1) penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; dan (H2) penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Model empiris penelitian diuji menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut: $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, di mana Y mewakili kualitas laporan keuangan, X_1 menunjukkan penerapan *Good Governance*, X_2 adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), α merupakan konstanta, b_1 dan b_2 adalah koefisien regresi, serta e melambangkan faktor kesalahan (error term).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Secara parsial, *Good Governance* berkontribusi terhadap peningkatan keandalan dan keterbukaan informasi keuangan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Sementara itu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menunjukkan pengaruh yang lebih dominan karena secara langsung mengatur proses pengakuan, pengukuran, serta penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan relevansi dan kredibilitas informasi yang dihasilkan. Hasil uji koefisien determinasi turut menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh penerapan kedua variabel tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan standar akuntansi yang konsisten menjadi faktor utama dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan, andal, dan akuntabel.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian, mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Penelitian ini melibatkan variabel dependen berupa kualitas laporan keuangan serta dua variabel independen, yakni penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat pola jawaban responden serta tingkat variasi data yang diperoleh melalui kuesioner.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan	56	33	42	36,93	2,15

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	56	28	41	35,68	2,91
<i>Good Governance</i>	56	30	46	38,55	4,03
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1, variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 36,93 dengan rentang 33,00 hingga 42,00 dan standar deviasi 2,15. Nilai tersebut mencerminkan persepsi responden yang relatif seragam serta menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tergolong baik. Untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), diperoleh nilai rata-rata 35,68 dengan nilai minimum 28,00, maksimum 41,00, dan standar deviasi 2,91. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman dan implementasi di antara aparatur yang kemungkinan dipengaruhi oleh variasi latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja. Sementara itu, variabel *Good Governance* menunjukkan nilai rata-rata tertinggi, yakni 38,55, dengan nilai minimum 30,00, maksimum 46,00, dan standar deviasi 4,03, yang menandakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah dijalankan secara cukup baik meskipun terdapat perbedaan pandangan antarresponden. Secara umum, seluruh variabel berada pada kategori baik dengan sebaran data yang normal, sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel secara akurat dan konsisten. Validitas menilai sejauh mana pernyataan dalam kuesioner merepresentasikan konsep yang diteliti, sedangkan reliabilitas menguji kestabilan hasil pengukuran ketika digunakan dalam kondisi serupa. Pengujian ini penting agar data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan layak digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara skor tiap butir pernyataan dan skor total variabel menggunakan metode *Pearson Product Moment*. Item dinyatakan valid apabila nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Hasil pengujian validitas untuk setiap variabel ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel *Good Governance* (X_1)

Kode Item	Koefisien Korelasi	Sig.	Keterangan
X1.1	0,765	0	Valid

X1.2	0,797	0	Valid
X1.3	0,892	0	Valid
X1.4	0,717	0	Valid
X1.5	0,788	0	Valid
X1.6	0,785	0	Valid
X1.7	-0,459	0,027	Valid
X1.8	0,639	0	Valid
X1.9	-0,365	0,006	Valid
X1.10	-0,339	0,011	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pada Tabel 2, seluruh item pernyataan dalam variabel *Good Governance* dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi korelasi yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap butir pernyataan mampu merepresentasikan aspek-aspek utama *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan secara akurat. Dengan demikian, instrumen *Good Governance* yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan dapat diandalkan untuk mengukur tingkat penerapan tata kelola pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X₂)

Kode Item	Koefisien Korelasi	Sig.	Keterangan
X2.1	0,771	0	Valid
X2.2	0,775	0	Valid
X2.3	0,857	0	Valid
X2.4	0,79	0	Valid
X2.5	0,753	0	Valid
X2.6	0,849	0	Valid
X2.7	0,843	0	Valid
X2.8	0,663	0	Valid
X2.9	0,663	0	Valid
X2.10	0,298	0,026	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, seluruh item pernyataan pada variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi korelasi yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan mampu merefleksikan aspek penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara akurat dan konsisten. Dengan demikian, instrumen Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan dapat digunakan secara layak untuk menilai tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kode Item	Koefisien Korelasi	Sig.	Keterangan
Y1	0,72	0	Valid
Y2	0,62	0	Valid
Y3	0,822	0	Valid
Y4	0,693	0	Valid
Y5	0,78	0	Valid
Y6	0,905	0	Valid
Y7	0,753	0	Valid
Y8	0,799	0	Valid
Y9	0,887	0	Valid
Y10	0,874	0	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4, seluruh item pernyataan dalam variabel kualitas laporan keuangan dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan mampu menggambarkan aspek-aspek utama kualitas laporan keuangan, seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, serta kemudahan untuk dipahami.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi internal instrumen penelitian dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Suatu variabel dianggap reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh melebihi 0,70, yang berarti instrumen tersebut menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Good Governance</i> (X ₁)	10	0,732	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₂)	10	0,856	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	10	0,925	Sangat Reliabel

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pada Tabel 5, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha yang melebihi 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan

konsisten. Variabel kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai reliabilitas tertinggi, yang mencerminkan tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Selain itu, hasil uji validitas juga mengonfirmasi bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner telah mampu mengukur variabel *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan kualitas laporan keuangan secara tepat. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dianggap layak serta dapat diandalkan untuk analisis lanjutan, termasuk pengujian asumsi klasik dan analisis regresi.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria statistik yang diperlukan, sehingga hasil analisis yang dihasilkan valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengujian ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Keterangan	Nilai
N	56
Mean	0
Std. Deviation	0,695802
Test Statistic	0,106
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,181
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,117

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pada Tabel 6, uji normalitas dengan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,181 dan *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,117. Kedua nilai tersebut lebih besar dari batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi, yang berarti model regresi linier berganda yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut tanpa adanya penyimpangan pada hasil estimasi koefisien.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
<i>Good Governance</i>	0,158	6,316

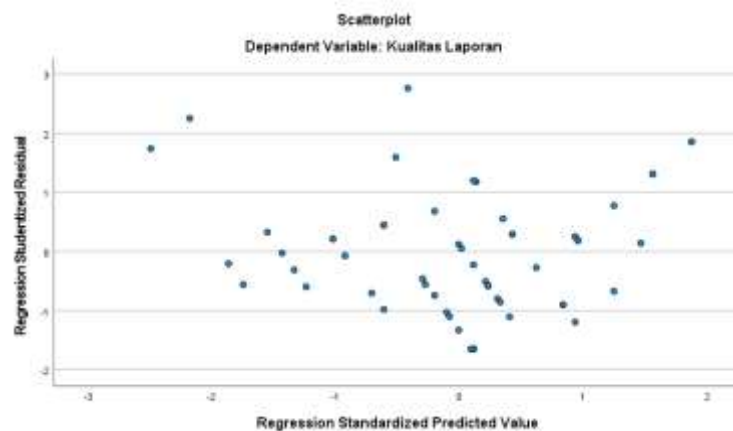
Standar Akuntansi Pemerintah	0,158	6,316
------------------------------	-------	-------

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,158 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 6,316. Nilai *tolerance* yang melebihi batas minimum 0,10 menunjukkan bahwa varians masing-masing variabel independen masih cukup besar dan tidak saling menjelaskan secara berlebihan. Sementara itu, nilai VIF yang berada di bawah 10 menandakan tidak adanya korelasi kuat antarvariabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas, sehingga kedua variabel independen dapat dianalisis secara terpisah dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan kesamaan varians residual pada seluruh nilai variabel independen. Hasil grafik scatterplot menunjukkan pola sebagai berikut.



Gambar 1. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Terpenuhinya asumsi tersebut menandakan bahwa model memiliki stabilitas yang baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, seluruh asumsi klasik telah terpenuhi, sehingga model regresi linier berganda yang digunakan dinyatakan layak untuk menganalisis hubungan serta pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial. Model ini dipilih karena dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Konstanta)	13.634	1.247	-	10.937	0.000
<i>Good Governance</i>	0.197	0.060	0.370	3.313	0.002
Standar Akuntansi Pemerintah	0.440	0.083	0.595	5.317	0.000

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pada Tabel 8, diperoleh persamaan regresi linier berganda: $Y = 13,634 + 0,197X_1 + 0,440X_2$. Nilai konstanta sebesar 13,634 menunjukkan tingkat dasar kualitas laporan keuangan ketika variabel *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak berpengaruh. Koefisien *Good Governance* bernilai positif sebesar 0,197, yang berarti semakin baik penerapan prinsip tata kelola pemerintahan, maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan. Sementara itu, koefisien Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 0,440 yang juga positif menandakan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi memberikan pengaruh lebih dominan terhadap peningkatan ketepatan dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsial, yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Tabel 9 Hasil Uji t (Pengaruh Parsial)

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
<i>Good Governance</i>	3.313	0.002	Berpengaruh signifikan
Standar Akuntansi Pemerintah	5.317	0.000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pada Tabel 9, variabel *Good Governance* memiliki nilai signifikansi 0,002 (<0,05), sehingga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, maka semakin baik pula mutu laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun variabel Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$), yang berarti memiliki pengaruh signifikan dan lebih dominan dibandingkan *Good Governance*, karena Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara langsung menentukan proses pengakuan, pengukuran, serta penyajian laporan keuangan, sehingga penerapannya yang konsisten lebih berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Determinasi

Uji determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian tersebut bertujuan mengetahui kontribusi *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah dalam memengaruhi variasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 11 Hasil Uji Determinasi (Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.946	0.895	0.891	0.70881

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 11, nilai *R Square* sebesar 0,895 menunjukkan bahwa 89,5% variasi Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Temuan ini menegaskan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,891 juga mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan data tetap tinggi dan stabil setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, sehingga model regresi yang digunakan dinilai valid dan dapat diandalkan dalam menganalisis hubungan antara penerapan *Good Governance*, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Temuan ini memperkuat pandangan teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah sebagai pihak agen dan masyarakat sebagai pihak prinsipal memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk meminimalkan terjadinya asimetri informasi. Dalam kerangka teori tersebut, praktik *Good Governance* berperan sebagai sistem pengendalian yang menumbuhkan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik, sehingga mampu mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penerapan prinsip transparansi memastikan bahwa setiap proses penyusunan dan pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka dan

dapat diakses oleh publik, sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut tanggung jawab aparatur dalam setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik. Sementara itu, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memperkuat legitimasi dan pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian *Enre* yang menjelaskan bahwa integrasi nilai-nilai *Good Governance* dapat memperkuat integritas pelaporan keuangan pemerintah (Enre, 2023). Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks birokrasi daerah, *Good Governance* berperan sebagai mekanisme kontrol moral dan administratif yang menumbuhkan budaya kerja yang jujur, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketika nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas telah tertanam dalam setiap proses birokrasi, potensi penyimpangan, manipulasi data, dan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.

Selain itu, pelaksanaan *Good Governance* yang konsisten mampu meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata publik dan lembaga pengawas eksternal. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat citra positif pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan terbuka terhadap pengawasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam menerapkan *Good Governance* menjadi salah satu prasyarat penting bagi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas tinggi, transparan, dan akuntabel, serta menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil yang diperoleh oleh Masnila, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia (Masnila et al., 2021). Hasil serupa juga dikemukakan oleh Pakpahan dan Murwaningsari, yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah (Pakpahan et al., 2022). Penelitian ini memperluas temuan-temuan sebelumnya dengan memberikan bukti empiris pada konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dalam kasus ini, praktik *Good Governance* yang konsisten dan terintegrasi terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya berdampak pada pencapaian administratif, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa *Good Governance* tidak sekadar menjadi prinsip normatif, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kualitas, kredibilitas, dan legitimasi laporan keuangan pemerintah, sekaligus menjadi

fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan berkelanjutan.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta menjadi variabel yang paling dominan dalam model penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan teori akuntabilitas, yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana publik secara transparan. Menurut Sartika, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berfungsi sebagai pedoman teknis dalam proses pencatatan, pengakuan, dan penyajian transaksi keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan (Sartika et al., 2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara konsisten memungkinkan laporan keuangan pemerintah memiliki tingkat relevansi, keandalan, serta keterbandingan yang tinggi antarperiode. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, tingkat kepatuhan yang baik terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mencerminkan profesionalisme aparatur dalam mengelola keuangan daerah dan menghasilkan laporan yang akurat, transparan, serta kredibel. Hal ini juga memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap praktik transparansi fiskal dan akuntabilitas publik sebagai pilar utama dalam tata kelola keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Agustina dan Setyaningrum yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Agustina & Setyaningrum dalam Suprihatin, 2017). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Setiyawati dan Iskandar, yang menjelaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual mampu memperkuat ketepatan dan transparansi informasi keuangan publik di Indonesia (Setiyawati & Iskandar dalam Aswindawaty et al., 2023). Penelitian ini memperluas hasil-hasil tersebut dengan memberikan bukti empiris bahwa dalam konteks pemerintahan daerah yang telah memiliki kematangan kelembagaan, seperti di Kabupaten Jombang, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memainkan peran yang lebih dominan dibandingkan *Good Governance*. Dominasi tersebut disebabkan oleh karakter Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang secara langsung mengatur prosedur teknis dalam penyusunan laporan keuangan, mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat dipandang sebagai landasan struktural yang memastikan keseragaman, keandalan, dan keterpaduan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik yang tinggi dan tata kelola keuangan yang lebih transparan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Good Governance* serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terbukti berperan penting dalam meningkatkan keandalan dan keterbukaan informasi keuangan, sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi faktor paling dominan karena secara langsung mengatur proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan. Secara teoritis, hasil ini memperkuat relevansi teori agensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal, tetapi juga oleh integritas tata kelola.

Penelitian ini berimplikasi pada perlunya pemerintah daerah memperkuat penerapan *Good Governance* secara konsisten dan meningkatkan kompetensi aparatur dalam memahami serta menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan benar agar akuntabilitas publik terus meningkat. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya meninjau dua variabel utama tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel-variabel tersebut atau menggunakan pendekatan *mixed methods*, serta memperluas objek penelitian pada daerah lain dengan karakteristik dan opini audit yang berbeda, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohim, I., Sindrawati, S., Lesmana, D., Kurniawati, K., & Sumiati, N. (2025). An Integrated Approach of Informatics Engineering and Information Systems in the Modernization of Public Administration. *Journal of Artificial Intelligence and Software Engineering*, 5(1), 62–69.
- Advia, R., Wibowo, A. S., & Diarsyad, M. I. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi empiris pada dinas kota palangka raya). *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8552>
- Angye Mareta, Frinaldi, A., & Roberia. (2025). Implementasi tantangan dan upaya dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia. *Al-Dyas : Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 233–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/alldyas.v4i1.4437>
- Aswindawaty, Mahmud, & Lukum, A. (2023). Jambura Accounting Review Penerapan SAP & Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 282–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/jar.v4i2.95>

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2025. *Jombang Raih WTP untuk Kali ke Dua Belas*. Diakses dari portal <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/jombang-raih-wtp-untuk-kali-ke-dua-belas/> pada Kamis, 25 Desember 2025 pukul 10.00 WIB.
- Enre, A. (2023). Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 5(2), 163–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.46918/point.v5i2.2092>
- Herawati, T., & Nopianti, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tuti Herawati De i Nopianti. *STAR: Study and Accounting Research*, 14(2), 32–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.55916/jsar.v14i2.10>
- Hirzun, M., Astini, Y., Fauzi, A. K., & Hidayat, D. (2024). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi, SPI dan Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 4(2), 109–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/rapik.v4i2.70>
- Masnila, N., Mayasari, R., & Firmansyah, F. (2021). The Effect of Good Government Governance on the Financial Reports Quality: The Case of Provincial Capital Governments in Indonesia. *International Journal of Business, Management & Economics*, 2(4), 271–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.47747/ijbme.v2i4.385>
- Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence Of Internal Control System Weaknesses And Audit Quality On The Quality Of Local Government Financial Reports In Indonesia With Good Government Governance As Moderating. *International Journal of Science, Technology and Management*, 3(2), 461–474. <https://doi.org/https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463>
- Sartika, D., Ridwan, R., Gainau, P. C., Arshandy, E., & Hermelinda, T. (2024). *Akuntansi Sektor Publik* (E. Setiawan (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Siti Munawaroh, Sayugo Adi Purwanto, Djupiansyah Ganie, & Caetano Carceres Correia. (2025). Improving Financial Report Quality Through *Good Governance* and Government Accounting Standards in Berau Regency. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(1), 57–75. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i1.289>
- Suprihatin, D. (2017). Pengaruh penerapan akuntabilitas publik dan budaya kerja terhadap pelaksanaan *Good Governance* (survey pada skpd di kab karawang). *JRAA*, 6(1), 1–13.
- Utami, R. H. S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Maneksi*, 13(2), 265–273. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i2.2200>
- Zein, F. A., Rachmawati, T., & Rahmiyati, N. (2024). The influence of *Good Governance*

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 1 (2026) 613 – 629 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i1.10984

and government accounting standards on the quality of local government financial reports in kab . Mojokerto pengaruh *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemda pendahuluan l. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 514–526. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.8552>